BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Aparatur Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Objek dalam penelitian ini merupakan aparatur Desa Kebondanas yang saat ini menjabat dalam lingkungan organisasi pemerintahan Desa Kebondanas. Aparatur yang menjadi objek penelitian ini mulai dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang.

4.1.2 Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

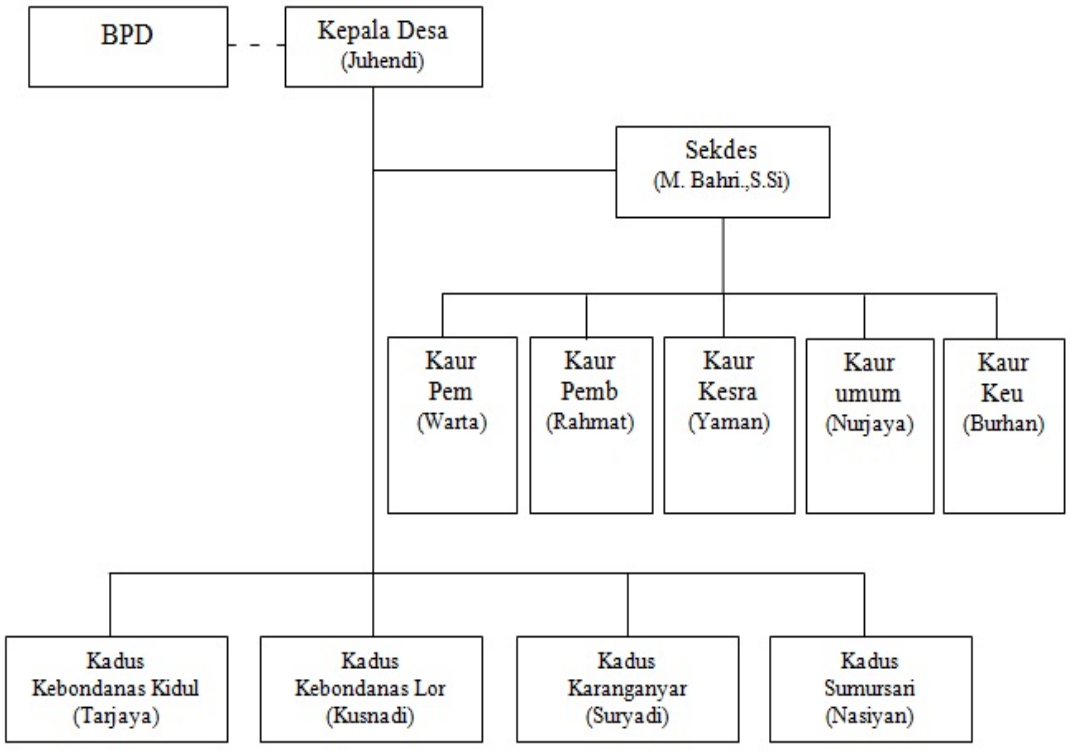
Objek penelitian ini secara keseluruhan adalah pembangunan yang ada di Desa Kebondanas yang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 634, 701 Ha, berdasarkan data desa, yang mempunyai letak geografis wilayah utara Kabupaten Subang berdekatan dengan Pantai Utara (Pantura) dengan mempunyai batas-batas wilayah si sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalentambo, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cigugur dan Desa Bojong Jaya, di Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karanganyar, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pusakajaya dan Desa Pusakaratu yang di pisahkan oleh sungai.

Desa Kebondanas merupakan salah satu desa dengan luas wilayah yang terluas di Kematan Pusakajaya, dan Desa Kebondanas seringkali menjadi pusat

kegiatan-kegiatan antar desa seperti acara uapacara bendera hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan acara-acara seperti kompetisi olahraga dan silaturahmi antar desa yang sering diselenggarakan di Desa Kebondanas dikarenakan letak Kantor Kecamatan yang bersebelahan dengan Kantor Desa Kebondanas.

Desa Kebondanas juga merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Pusakajaya dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat struktur organisasi yang di buat untuk membagi tugas-tugas antar aparatur, dengan struktur organisasi yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Kebondanas



(Sumber : Kantor Desa Kebondanas Tahun 2015)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, Desa Kebondanas juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

   Terwujudnya Desa Kebondanas sebagai desa yang indah, maju, berilmu, dan bertaqwa, serta membangun masyarakat yang mandiri.

b. Misi

   1. Meningkatkan rasa ketaqwaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat
   2. Meningkatkan dan menata infrastruktur desa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.
   3. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan profesional di sektor pertanian.
   4. Membangun perekonomian masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan.

4.1.3 Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Kecamatan Pusakajaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang yang berada di wilayah yang dilewati jalur pantura yang merupakan kecamatan pamekaran dari Kecamatan Pusakanagara. Kecamatan Pusakanagara mempunyai batas-batas wilayah di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pamanukan, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Compreng, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pusakanagara.

Gambar 4.2
Wilayah Kecamatan Pusakajaya



Sumber : Kantor Kecamatan Pusakajaya Tahun 2015

Kecamatan Pusakajaya juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya kecamatan Pusakajaya sebagai wilayah Agribisnis yang berwawasan lingkungan dan Religius serta budayamelalui pembangunan berbasis gotong royong pada tahun 2025.

Misi

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan prasarana wilayah yang berkualitas;
4. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2 Kemampuan Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Kemampuan merupakan salah satu syarat bagi seseorang untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, dengan adanya kemampuan, seseorang akan dapat melakukan berbagai hal dalam pekerjaan dalam bidang yang digelutinya, dan bahkan dapat juga melakukan pekerjaan dalam bidang lainnya. Kemampuan bisa juga dikatakan sebagai kekuatan, atau daya yang dipunyai oleh sesorang baik itu dari bakat alamiah yang dimiliki atau juga kemampuan dapat muncul akibat belajar menggunakan panca indera yang dimiliki.

Kemampuan dalam melihat kinerja aparatur Desa Kebondanas dalam menjalankan pembangunan di Desa Kebondanas dipengaruhi oleh dua indikator utama yaitu kecerdasan intelektual (*Intelegensi Quintions*) dan juga keterampilan yang dimiliki oleh aparatur. Melalui dua indikator tersebut akan dapat mempangaruhi hasil kerja aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa kebondanas.

Kecerdasan intelektual dari aparatur akan sangat mempengaruhi jalannya pembangunan di Desa Kebondanas, aparatur yang cerdas dalam menyusun rencana pembangunan, dan cerdas mengelola anggaran serta tepat sasaran dalam menerapkan pembangunan akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik di Desa Kebondanas, akan tetapi jika yang terjadi justru sebaliknya, aparatur kurang matang menyusun rencana pembangunan, buruk dalam mengelola anggaran, akan dapat membuat pembangunan di Desa Kebondanas akan berjalan kurang maksimal. Keterampilan juga perlu dimiliki oleh aparatur, aparatur yang terampil

dan cekatan dalam menjalankan tugas-tugasnya akan dapat mengahasilkan kinerja yang baik, ditambah dengan keterampilan aparatur dalam menyatukan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan di Desa Kebondanas untuk mempunyai jiwa gotong royong dan musyawarah tentu akan dapat meningkatkan peluang menghasilkan hasil pembangunan yang baik, akan tetapi aparatur yang kurang mempunyai inisiatif akan membuat peluang pembangunan yang sukses semakin mengecil.

4.2.1 Kecerdasan Intelektual Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan berfikir seseorang dalam kehidupan sosialnya, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hidupnya, kemampuan berfikir tersebut dapat diukur oleh seseorang melalui test yang sering kita dengar yaitu melalui *test IQ* (*Intelegent Quintions*), dimana dalam *test* tersebut digambarkan kemampuan berfikir seseorang melalui angka-angka untuk menilai sepandai apa kemampuan berfikir seseorang tersebut, kecerdasan intelektual pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia, karena berasal dari akal yang memang diberikan oleh tuhan. Kecerdasan intelektual dapat pula dikembangkan melalui cara belajar, baik itu melalui pendidikan atau belajar dari pengalaman kehidupan.

Sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, tentu aparatur desa diharapkan mempunyai kecerdasan intelektual yang baik, dalam hal ini tingkat

pendidikan yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Kebondanas, dalam melakukan rekruitmen perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tentu harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk di angkat menjadi perangkat desa dan mempunyai jabatan dalam pemerintahan desa.

Tingkat pendidikan aparatur selayaknya dapat dijadikan patokan bagi Kepala Desa untuk menentukan aparatur yang akan menjadi aparatur pemerintahan desa, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 50 Ayat 1 yang tertulis bahwa perangkat desa yang memenuhi persyaratan adalah perangkat desa dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat. Faktanya saat ini perangkat desa yang ada di Desa Kebondanas masih terdapat aparatur yang kurang memenuhi persayaratan sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 50 ayat 1, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Data Diri Aparatur Desa Kebondanas

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Pendidikan
1	H. Juhendi	Dusun Kebondanas Lor RT/RW 11/03	Kepala Desa	SMU
2	M. Bahri.,S.Si	Dusun Kebondanas Kidul RT/RW 05/01	Sekertaris Desa	S1
3	Warta	Dusun Karanganyar RT/RW 17/04	Kaur Pemerintahan	SMU
4	Rahmat	Dusun Kebondanas Lor RT/RW 9/02	Kaur Pembangunan	SMU
5	Yaman	Dusun Kebondanas Kidul RT/RW 5/01	Kaur Kesra	SMP
6	Nurjaya	Dusun Karanganyar RT/RW 16/04	Kaur Umum	SMU
7	Burhan	Dusun Kebondanas Kidul RT/RW 6/02	Kaur Keuangan	SMU
8	Tarjaya	Dusun Kebondanas Kidul RT/RW 03/01	Kadus Kebondanas Kidul	SMP
9	Kusnadi	Dusun Kebondanas Lor RT/RW 11/03	Kadus Kebondans Lor	SMP
10	Suryadi	Dusun Karanganyar RT/RW 15/03	Kadus Karanganyar	SMP
11	Nasiyan	Dusun Sumursari RT/RW 20/05	Kadus Sumursari	SD

Sumber : Desa Kebondanas Tahun 2015

Tabel di atas menunjukan bahwa aparatur Desa Kebondanas sebenarnya sudah mempunyai sebagian besar perangkat desa yang sudah sesuai dengan syarat tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan hanya satu orang yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan untuk aparatur Kepala Dusun memang tidak ada batasan pendidikan untuk menjadi salah satu aparatur desa, akan tetapi dalam perekrutan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa masih belum efektif karena masih banyak perangkat desa yang baru menjabat di pemerintahan desa, dan hanya dua aparatur yang sudah berpengalaman menjalankan Kepala Urusan di Desa Kebondanas.

Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perangkat desa yang seharusnya di pilih oleh Kepala Desa di wajibkan agar mempunyai tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, akan tetapi dengan adanya satu jabatan Kepala Urusan di Desa Kebondanas yang dijabat oleh aparatur yang mempunyai pendidikan di bawah SMA, tentu hal ini melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melakukan rekruitmen perangkat desa.

Berjalan baik atau tidaknya pembangunan yang ada di Desa Kebondanas tentu dikarenakan oleh kemampuan aparatur itu sendiri dalam menjalankan pekerjaannya, dan tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya, aparatur yang mempunyai tingkat pendidikan yang memadai tentu diharapkan akan mampu mempunyai kecerdasan intelektual dan pengalaman yang baik, dan yang lebih penting lagi dapat mengetahui aturan-

aturan dalam melaksanakan pembangunan, karena sebagai penyelenggara pemerintahan desa, tentu akan selalu ada aturan dalam menjalankan pekerjaannya.

Dalam menjalankan pembangunan tentu aparatur diwajibkan untuk memahami dasar hukum pelaksanaan pembangunan di desa, dalam hal ini aparatur harus memahami mengenai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan juga memahami Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, agar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan di Desa Kebondanas selalu berlandaskan kepada aturan diatasnya dan tidak bertentangan.

Pembangunan yang ada di Desa Kebondanas pada saat ini masih mengalami berbagai hambatan-hambatan, salah satunya adalah dengan makin seringnya masyarakat melakukan demo di kantor desa, yang terakhir pada tanggal 15 juni 2015, masyarakat menuntut pengusutan secara tuntas jual beli tanah parkir senilai 650 juta rupiah yang dananya entah kemana, jual beli tanah parkir tersebut rencananya akan digunakan oleh kecamatan untuk mendirikan kantor kecamatan di sebelah kantor desa, akan tetapi dalam hal ini pemerintah desa tidak mengikutsertakan masyarakat dari berbagai pihak untuk mengetahui jalannya proses pembelian tanah parkir tersebut. Penjualan lahan parkir yang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Kebondanas tersebut juga biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk berolahraga bola voli yang tentu sekarang menghilangkan kegiatan bola voli masyarakat yang memang suka terhadap olahraga tersebut, dan hal tersebut mengundang protes.

Gambar 4.3
Lahan Parkir yang akan di Bangun Kantor Kecamatan Pusakajaya



Sumber : Dokumentasi tahun 2015

Gambar di atas merupakan gambar dari fondasi yang rencananya akan dibangun kantor Kecamatan Pusakajaya yang menuai polemik dari masyarakat Desa Kebondanas, yang bahkan dalam proses penjualan tersebut tidak melibatkan pendapat masyarakat, pemerintah desa hanya mewakilkan masyarakat melalui BPD, sehingga detail mengenai penjualan tanah parkir tersebut hanya diketahui oleh orang-orang pemerintahan saja, padahal dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 54 menyebutkan bahwa musyawarah desa diharuskan dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat, adapun musyawarah desa tersebut adalah membahas hal strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, investasi, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.

Berdasarkan aturan tersebut peneliti mengasumsikan bahwa pemerintah desa belum cukup mempunyai kemampuan dalam memahami aturan yang ada mengenai tata cara menyelenggarakan pemerintahan, tidak pernah diajaknya

masyarakat dalam musyawarah desa juga diperkuat oleh pernyataan aparatur desa sebagai berikut :

> Sebenarnya kalau ada rapat terkait anggaran dan program desa, kita selalu di diskusikannya kepada masyarakat melalui BPD yang kemudian akan menyampaikannya kepada masyarakat. Soalnya sekarang aturannya baru sih, jadi ngga kaya dulu lagi, sekarang mah hanya diwakilkan oleh BPD saja, kan BPD juga wakil dari rakyat yang kemudian akan menyampaikannya kepada rakyat.(11/06/2015)

Berdasarkan penuturan dari aparatur tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa aparatur tersebut kurang memahami Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54, dan peneliti menganggap dengan fakta yang terjadi dalam musyawarah desa yang tidak pernah melibatkan unsur masyarakat sebagai bentuk transparansi, peneliti menganggap kemampuan aparatur pemerintahan Desa Kebondanas dalam memahami aturan yang ada masih kurang baik. Perihal musyawarah desa yang tidak pernah melibatkan masyarakat juga diakui oleh masyarakat sebagai berikut : “Kalau masyarakat tidak pernah diajak musyawarah, kalau lewat BPD saja kan menurut saya juga kurang efektif karena rakyat tidak langsusng tahu, mending kalau hasil rapatnya di umumkan kepada masyarakat luas”. (8/06/2015)

Berdasarkan pendapat di atas, memang benar rasanya kurang efektif apabila musyawarah desa hanya dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD, tanpa kehadiran unsur masyarkat, belum lagi masyarakat juga kecewa karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan hal-hal strategis desa lainnya, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, paling tidak dalam membahas hal-hal strategis desa paling tidak satu tahun sekali pemerintahan desa menyelenggarakan musyawarah desa dengan melibatkan unsur masyarakat di dalamnya, karena benar

sekali apa yang informan katakan bahwa perwakilan melalui BPD di rasa kurang efektif dalam menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam musyawarah desa karena proses transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang terpenuhi dengan baik, selain itu juga jika adanya masyarakat, maka ide dan gagasan yang akan masuk akan semakin bervariatif.

Kemampuan aparatur dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kebondanas saat ini dapat terlihat dari kondisi infrastruktur yang ada di Desa Kebondanas seperti jalan, irigasi air, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi pembangunan jalan yang ada saat ini di 4 Dusun Desa Kebondanas di nilai masih belum memenuhi harapan masyarakat, aparatur desa mengatakan bahwa pembangunan jalan di Desa Kebondanas setiap tahun dilakukan perbaikan jalan secara bergiliran di tiap dusun, aparatur desa juga mengatakan bahwa di Dusun Kebondanas Kidul di RT 1 telah dilakukan pengaspalan jalan, akan tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti sejauh ini melihat semua jalan di RT 1 hanya sedikit sekali

Pembangunan irigasi air yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelebaran irigasi dan sungai, pembersihan air sungai dari sampah, mengurangi pendangkalan, dan pengecoran irigasi. Dari ke empat aktivitas pembangunan irigasi yang disebutkan di atas tersebut peneliti sejauh ini melihat berdasarkan informasi dari aparatur dan masyarakat hanya baru dua aktivitas pembangunan irigasi yaitu pelebaran irigasi sekaligus pengecoran irigasi yang pernah dilakukan dua kali di Dusun Kebondanas Lor dan Kebondanas Kidul, di Dusun Kebondanas Kidul juga pernah terjadi pengecoran irigasi lain, akan tetapi berdasarkan

informasi dari masyarakat pengecoran tersebut dilakukan bersamaan dengan pembangunan masjid di Dusun Kebondanas Kidul bukan dari dana desa karena masyarakat sudah berulang kali menyampaikan keluhan soal irigasi karena kerap banjir dan membuat sawah yang di pinggir irigasi tenggelam karena kondisi tanahnya yang dalam akhirnya masyarakat sepakat untuk mengecor pinggiran irigasi agar juga air dapat mengalir secara benar dan tidak masuk ke halaman masjid dan rumah masyarakat.

Gambar 4.4
Pembangunan Masjid dan Pengecoran Irigasi di Dusun Kebondanas kidul



Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Gambar di atas merupakan masjid jamie As-Sulaimaniyah yang dibangun pada tahun 2014 dan di samping dan belakang masjid dilakukan pengecoran pondasi irigasi yang dipenuhi sampah, juga di seberang irigasi juga di buat pondasi akan tetapi lebih pendek daripada yang di samping masjid, pengecroan dan pembangunan masjid As-Sulaimaniyah tersebut sama sekali tidak melibatkan pemerintah Desa Kebondanas, baik itu dalam hal anggaran atau keterlibatan

pemerintah desa, pembangunan tersebut mandiri oleh masyarakat dusun Kebondanas kidul, dan memang ada aparatur desa seperti bapak Yaman dan beberapa RT yang sesekali ikut serta melakukan gotong royong dalam pembagunan masjid, akan tetapi hal itu dilakukan karena tempat tinggal yang dekat dengan lokasi pembanunann masjid.

Pembangunan dalam hal kesehatan di Desa Kebondanas menurut peneliti saat ini berjalan sangat baik, posyandu yang sebelumnya belum memiliki gedung yang layak, saat ini di setiap dusun mempunyai gedung sendiri yang bisa di buat aktivitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang menggunakan dana dari desa. Untuk pendidikan di Desa Kebondanas terdapat tempat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Dusun Kebondanas Kidul, dan Kebondanas Lor, menggunakan gedung posyandu sebagai tempat aktivitas, sementara di Dusun Sumursari dan Karanganyar tidak mempunyai TK.

Gambar 4.5
Gedung Posyandu dan Gedung TK di Dusun Kebondanas Kidul



Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Gambar di atas merupakan salah satu gedung Posyandu di Desa kebondanas yang juga digunakan sebagai tempat belajar siswa dan siswi Taman Kanak-kanak yang memang tidak mempunyai gedung sendiri, sehingga menumpang di gedung Posyandu. Kecerdasan aparatur dalam pembangunan sebenarnya menurut pengamatan peneliti sejauh ini cukup baik, akan tetapi kurang dimanfaatkan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunannya, dan kurang matang dalam perencanaannya, hal ini perlu adanya introspeksi diri dan lebih mementingkan urusan masyarakat, karena dalam menjalankan pemerintahan desa, perlu adanya dukungan dari masyarakat agar dapat tercipta pembangunan yang optimal, aparatur juga perlu mengasah kecerdasan mereka dalam memahami aturan mengenai pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga berjalan sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan.

4.2.2 Keterampilan Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Keterampilan (*skill*) merupakan keahlian dari seseorang dalam suatu hal dan bisa juga dikatakan sebagai bakat seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, *output* yang dihasilkan oleh keterampilan dari seseorang tersebut bisa saja berbentuk barang, atau juga mampu mempengaruhi orang lain sehingga dapat menjadi motivasi bagi orang lain agar dapat berbuat seperti yang dia harapkan.

Keterampilan pada zaman sekarang ini sangatlah dibutuhkan, baik itu swasta atau pemerintah membutuhkan orang-orang yang terampil dan cekatan

dalam menjalankan tugas-tugasnya, begitu juga Desa Kebondanas dalam menjalankan pemerintahannya dibutuhkan aparatur yang mempunyai *skill* dalam menjalankan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kebondanas, dibutuhkan aparatur-aparatur yang bisa bekerja cepat, pandai memahami aturan, mempunyai inisiatif, dan mempunyai inovasi berupa ide dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Keterampilan aparatur Desa Kebondanas dapat peneliti uraikan berdasarkan hasil penelitian, bahwa saat ini masyarakat kurang puas terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebondanas terkait pertanian dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa yang tidak pernah melibatkan masyarakat. Saat ini masyarakat Desa Kebondanas jarang sekali melakukan kegiatan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan desa, sifat gotong royong di antara masyarakat untuk melaksanakan program-program dari desa saat ini perlahan hilang karena kurang terbukanya aparatur dalam melaksanakan pembangunan kepada masyarakat.

Selain itu juga aparatur Desa Kebondanas kurang menunjukan sikap kepemimpinan dalam memajukan desa dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam membangun desa seperti mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dalam merencakan program-program yang strategis, atau mengajak masyarakat untuk ikut kerja bakti, sehingga dapat lebih menghemat anggaran, seperti contohnya dalam pengecoran irigasi di Dusun Kebondans Lor dan Kebondanas Kidul, seharusnya aparatur dapat menjadi motivator bagi masyarakat yang memiliki sawah dengan mengandalkan irigasi tersebut untuk

bekerja bakti karena nantinya juga akan berguna bagi para petani, akan tetapi berdasarkan pengamatan secara langsung proses pengecoran irigasi di Dusun Kebondans Lor, dan juga informasi dari pekerja dan aparatur, program pengecoran fondasi irigasi tersebut di borongkan kepada pemborong bangunan yang pekerjanya bukan hanya warga Desa Kebondanas, tetapi juga banyak masyarakat dari Desa Cigugur dan Pusakajaya.

Peneliti menganggap jika pembangunan tersebut dilaksanakan dengan mengajak masyarakat yang mempunyai sawah yang mengandalkan irigasi tersebut, pastinya akan lebih menghemat anggaran. Aparatur Desa Kebondanas kurang terampil dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program-program pembangunan pemerintah desa, hal ini terlihat dari pembangunan masjid As-Sulaimaniyah pada tahun 2014 sampai 2015 ini, masjid yang berdiri di atas tanah waqaf di Dusun Kebondanas Kidul ini berdiri tanpa campur tangan pemerintah desa, begitu juga pembangunan masjid Al-Furqon di Dusun Kebondanas Lor.

Masyarakat mempunyai inisiatif sendiri dalam membangun masjid menggunakan dana dari hasil sodaqoh masyarakat, dalam pembangunan kedua masjid tersebut aparatur juga mengakui bahwa anggaran desa sama sekali tidak digunakan dalam pembangunan kedua masjid tersebut dan bersifat mandiri dari masyarakat, dalam proses pembangunannya juga bukan aparatur yang menjadi pelopor bagi pembangunan masjid tersebut, tapi beberapa tokoh di masyarakat. Pembangunan kedua masjid tersebut juga sebagian besar pekerjanya merupakan bukan pekerja bayaran, akan tetapi masyarakat yang secara sukarela melakukan

gotong royong agar berdirinya masjid tersebut, bukan hanya pekerja lelaki saja yang bekerja secara sukarela, bahkan para ibu-ibu juga bekerja gotong royong menyediakan masakan bagi para pekerja.

Berdasarkan pembangunan masjid di Desa Kebondanas tersebut, peneliti menganggap sebenarnya sifat gotong royong diantara masyarakat Desa Kebondanas sangatlah kental, akan tetapi aparatur desa kurang terampil dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan gotong royong. selain keterampilan dalam memotivasi masyarakat, peneliti juga melihat keterampilan aparatur dalam bidang pertanian juga sangat minim, seperti yang saat ini terjadi sulitnya para petani mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka.

Gambar 4.6
Kekeringan Sawah di Desa Kebondanas



Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Gambar di atas merupakan kondisi sebagian besar sawah yang ada di Desa Kebondanas yang mengalami kekeringan, dua tahun belakangan ini petani di Dusun Kebondanas lor, Dusun Karanganyar, dan Dusun Sumursari hanya mengandalkan musim hujan untuk melakukan tanam padi, pada musim panas

seperti saat ini, terpaksa petani tidak melakukan tanam padi dan tentu menghambat perekonomian masyarakat. Kekeringan yang melanda sawah-sawah di Desa Kebondanas disebabkan oleh beberapa faktor, seperti irigasi yang kurang lancar, telatnya pasokan air dari sungai, dan jadwal giliran air yang tidak menentu, selain itu juga kondisi sawah yang lebih tinggi dari sungai juga membuat sulit petani untuk mengambil air.

Kekeringan sawah yang terjadi, berdasarkan informasi masyarakat, dikarenakan pemerintah desa kurang memberikan kontrol terhadap permasalahan para petani, dan jarang mendiskusikannya dengan petani, selain itu juga aparatur kurang terampil dalam mengurusi irigasi, yang berakibat sering munculnya demo-demo oleh para petani agar pemerintah desa dapat berkehendak sesuai harapan petani, tetapi meski seringkali demo dilakukan tetap saja tidak ada perubahan, dan masalah dari musim tanam padi selalu sama yaitu mengenai irigasi.

Selain mengenai pembagian irigasi, kondisi irigasi dan sungai yang ada di Desa Kebondanas juga sering dipenuhi sampah, masyarakat kurang mempunyai kesadaran dalam membuang sampah juga sangat rendah, masyarakat yang mempunyai tempat tinggal dekat irigasi dan sungai, sangat suka membuang sampah ke irigasi, maupun sungai, sehingga sungai yang mengalami kekeringan, dengan jelas terlihat penumpukan sampahnya, dan apabila air sungai dan irigasi sedang banjir, sampah menumpuk di pintu air dan jembatan-jembatan. Berikut adalah salah satu contoh irigasi yang dipenuhi sampah

Gambar 4.7
Irigasi Yang Penuh Sampah



Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Gambar di atas memperlihatkan budaya membuang sampah masyarakat Desa Kebondanas yang masih rendah, untuk itulah keterampilan aparatur dalam mempengaruhi masyarakat diperlukan, selain itu juga aparatur perlu memberikan solusi atas sampah kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lalui, ternyata 3 tahun lalu sebenarnya ada pembagian dana dari desa dengan jumlah sekitar 500 ribu rupiah kepada setiap masyarakat tertentu, hal ini di katakan oleh Kepala Urusan Pembangunan, akan tetapi pembagian dana tersebut tidak seluruhnya dibagikan untuk masyakat Desa Kebondanas, akan tetapi untuk masyarakat dengan kriteria tertentu seperti lahan yang sempit, kurang mampu, dan kriteria lainnya.

Pembagian dana tersebut dibagikan desa untuk membangun tempat sampah permanen menggunakan bata, semen, dan pasir, akan tetapi dalam pelaksanaannya peneliti melihat hanya sedikit masyarakat yang menggunakan uang tersebut secara benar untuk membuat tempat sampah, dan peneliti juga

masih menemukan masyarakat yang benar-benar tidak mampu yang tidak kebagian dana tersebut. Pembagian dana tersebut sebenarnya terjadi pada masa kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya, menurut peneliti akan sangat bagus apabila diteruskan, akan tetapi berdasarkan penjelasan aparatur Desa Kebondanas, dana desa yang akan digunakan akan difokuskan pada pembangunan irigasi dan jalan.

Dari hasil pemaparan yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti menganggap bahwa aparatur Desa Kebondanas dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kebondanas kurang mempunyai kemampuan berupa keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya membangun Desa Kebondanas yang berakibat kurang lancarnya pembangunan infrastruktur di Desa Kebondanas. Aparatur kurang memanfaatkan kepemimpinan yang mereka punya untuk menggerakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan bersama-sama.

Jika aparatur mampu berfikir kreatif dan memanfaatkan sifat gotong royong masyarakat dan tidak mengandalkan sisitem borong dalam pembangunan di desa, tentu akan semakin baik baik kelancaran pembangunan Desa Kebondanas, anggaran akan dapat lebih di hemat, hubungan antara pemerintahan desa dan masyarakat juga akan terjalin dengan baik, dan masyarakat akan dapat menganggap pemerintah desa sebagai panutan dan hal ini tentu memudahkan aparatur Desa Kebondanas dalam mengkoordinasi masyarakat untuk bekerjasama dalam pembangunan.

4.3 Motivasi Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Motivasi merupakan dorongan dari dalam hati seseorang untuk dapat melakukan kegiatan yang diinginkannya yang membuat seseorang tersebut merasa bersemangat dalam menjalankan kegiatannya, agar seseorang mendapatkan motivasi dalam melakukan aktivitasnya, terkadang diperlukan adanya dorongan dari berbagai hal yang dapat meningkatkan motivasi, salah satunya seperti kecintaan pada aktivitas yang akan dikerjakan, atau juga hasil yang telah ditargetkan akan terwujud apabila seseorang tersebut menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diharapkannya, dan motivasi bisa juga lahir karena adanya dorongan dari orang lain.

Motivasi dalam menjalankan pekerjaan tugas-tugas pemerintahan di desa, juga harus dipunyai oleh setiap aparatur agar dalam mengerjakan pekerjaannya selalu di kerjakan dengan penuh tanggung jawab, motivasi dalam mengerjakan pembangunan di Desa Kebondanas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, sikap kepemimpinan, sikap bawahan, iklim kerja, fasilitas kerja, hubungan kerja antar aparatur, kebijakan pimpinan, kondisi kerja, pola kepemimpinan yang dapat mendorong aparatur untuk bekerja lebih baik lagi.

4.3.1 Sikap Kepemimpinan Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Sikap kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai sikap dari pemimpin terhadap bawahannya dalam lingkungan organisasi, sikap yang ditunjukan atasan terhadap bawahannya dapat mempengaruhi motivasi seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, atasan yang mempunyai sikap kalem dan mampu memberikan pengarahan kepada bawahannya dengan cara-cara yang tidak terlalu keras akan dapat meningkatkan motivasi para pekerja untuk menyelesaikan hasil pekerjaannya, akan tetapi jika sikap kepemimpinan justru sebaliknya, maka akan dapat menurunkan motivasi pekerja yang dapat berujung dengan hasil kerja yang kurang berkualitas.

Sebagai suatu organisasi pemerintahan yang berada di desa, pemerintah Desa Kebondanas mempunyai struktur organisasi yang jelas mengenai aparatur yang menduduki jabatan sebagai perangkat desa, dalam organisasi, setiap aparatur mempunyai mempunyai tugas masing-masing terhadap bawahannya, atau juga kepemimpinannya di masyarakat.

Sikap kepemimpinan aparatur di dalam Kantor Desa Kebondanas sebenarnya peneliti melihat dari situasi kerja yang kondusif antara bawahan dan pimpinan yang sering duduk bersama mengobrol baik itu di dalam kantor atau di kantin, akan tetapi aktivitas mengobrol yang dilakukan oleh aparatur tersebut menurut peneliti tidak seharusnya dilakukan pada saat jam kerja berlangsung, karena akan mengganggu pekerjaan, peneliti sering sekali melihat aparatur desa

mengobrol di kantin desa baik itu dengan aparatur desa lainnya atau juga dengan aparatur kecamatan. Hubungan aparatur dengan kepemimpinan yang terlihat baik juga di perkuat oleh pernyataan beberapa aparatur yang mengatakan bahwa pimpinan, yaitu Kepala Desa dan Sekertaris Desa (Sekdes) mempunyai sikap yang ramah terhadap bawahannya, begitu juga Sekdes yang menilai sikap Kepala Desa yang ramah saat peneliti menanyai beberapa aparatur di kantor desa.

Sikap kepemimpinan Kepala Desa juga di ungkapkan oleh dua aparatur yang peneliti tanyai bukan di Kantor Desa, mereka sepakat mengatakan bahwa sikap kepemimpinan Kepala Desa berubah akhir-akhir ini menjadi lebih ramah, sebelumnya sikap Kepala Desa cukup keras terhadap bawahannya saat pertama kali menjabat, peneliti menganggap mungkin sikap sedikit keras terhadap bawahan mungkin disebabkan karena ada beberapa hal yang kurang disukai oleh Kepala Desa terhadap hasil kerja bawahannya, namun seiring berjalannya waktu antara bawahan dengan atasan menemukan kesamaan berfikir dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kebondanas.

Perangkat Desa yang di angkat oleh Kepala Desa juga terbilang awet, karena selama menjabat pada periode ini, hanya terdapat satu kali pergantian aparatur, yaitu Kepala Urusan Umum yang di ganti karena sakit, aparatur lainnya belum mengalami pergantian, yang menurut peneliti sikap kepemimpinan Kepala Desa cukup di terima oleh bawahannya, sikap pemimpin yang dapat diterima oleh bawahannya akan dapat membuat semangat bekerja menjadi meningkat.

Mengenai sikap kepemimpinan Kepala Desa juga peneliti juga menanyakan kepada dua Rukun Tetangga (RT) di tiap dusun, dari kedelapan RT

pada umunya tidak mempersalahkan mengenai sikap kepemimpinan Kepala Desa, Kepala Desa di nilai mempunyai sikap yang baik kepada para bawahannya, akan tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa komunikasi Kepala Desa dengan para RT kurang berjalan baik. Kepala Desa jarang membicarakan mengenai program-program pembangunan atau membicarakan hal lainnya dengan para RT, Kepala Desa di nilai jauh untuk bersosialisasi dengan para RT.

Selain kepemimpinan Kepala Desa, peneliti juga menanyakan sikap kepemimpinan Kepala Dusun kepada para RT tersebut dan kepada masyarakat, para RT menilai Kepala Dusun Kebondanas Kidul sangat baik kepada para RT, begitu juga Kepala Dusun di Dusun Kebondanas Lor, Dusun Karanganyar, dan Dusun Sumursari, akan tetapi para RT menilai Kepala Dusun dan Kepala Desa kurang terbuka dan kurang melibatkan para RT dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa Kebondanas, para RT hanya di beri tahu saja apabila ada kegiatan dan merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaann. Sedangkan sebagian masyarakat dari ke empat dusun tersebut yang peneliti jadikan informan, masih ada yang menganggap bahwa sikap para Kepala Dusun kurang terbuka kepada masyarakat, apalagi jika ada pembangunan seperti jalan dan irigasi, Kepala Dusun kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui RT atau melalui diri sendiri dalam bermasyarakat.

Peneliti menganggap bahwa kepemimpinan dari aparatur Desa Kebondanas kepada aparatur lainnya dan kepada masyarakat masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama mengenai sikap keterbukaan kepada masyarakat yang menginginkan sikap terbuka dan bermusyawarah dengan mereka, sikap

melibatkan masyarakat perlu diutamakan mengingat pentingnya pembangunan bagi Desa Kebondanas, untuk menggali potensi desa dan menciptakan perekonomian dan kesejahteraan sosial meningkat di masyarakat, hal itu perlu adanya sikap terbuka dari aparatur kepada masyarakat, sehingga akan menimbulkan rasa percaya kepada aparatur, dan aparatur juga akan mendapatkan dukungan, yang bisa meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kebondanas.

Dukungan dari antar aparatur memang sangat diperlukan untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja, akan tetapi dukungan dari aparatur saja menurut peneliti masih kurang cukup untuk menghasilkan motivasi kerja yang tinggi, dukungan masyarakatlah yang akan sangat mempengaruhi terlaksanannya pembangunan berkelanjutan di Desa Kebondanas, serta memperbaiki komunikasi antara aparatur kepada masyarakat sangat penting, aparatur perlu melakukan sosialisasi secara langsung kepada seluruh masyarakat Desa kebondanas, bukan hanya saja di lingkungan tempat tinggalnya, karena sebagai aparatur desa, akan sangat bermanfaat jika dapat membangun komunikasi yang luas kepada seluruh masyarakat di Desa kebondanas, karena akan menumbuhkan sikap percaya dari masyarakat kepada aparatur, dan demo-demo yang terjadi tidak akan terjadi lagi apabila aparatur mampu bersikap terbuka dan menjalin komunikasi yang luas dengan masyarakat.

Sikap kepemimpinan sangat penting baik itu di dalam organisasi atau kepemimpinan aparatur kepada masyarakat karena akan menentukan kelancaran pembangunan di Desa Kebondanas, jika masyarakat menganggap aparatur sebagai

teladan yang harus di ikuti, peneliti yakin dalam menerapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan akan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Sikap kepemimpinan aparatur terhadap masyarakat yang telah peneliti gambarkan dalam pembangunan infrastruktur Desa Kebondanas, memang masih perlu diperbaiki lagi mengenai cara-cara melakukan kepemimpinan mulai dari aparatur dan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat sehingga pemerintah desa mempunyai kharisma dalam melakukan pengarahan kepada masyarakat agar saling memahami dalam membangun desa, dan salah satu upayanya dengan selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

4.3.2 Sikap Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Sikap aparatur merupakan sikap yang ditunjukan oleh antar apartur Desa Kebondanas, sikap yang ditunjukan bisa saja berupa sikap saling mendukung satu sama lain (pro), juga bisa saja sikap yang menunjukan penentangan (kontra), baik secara horizontal, atau vertikal di dalam lingkungan organisasi Desa Kebondanas. Sikap yang saling mendukung antar aparatur Desa Kebondanas akan dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja, akan tetapi apabila di dalam organisasi timbul sikap saling tidak menyukai akan dapat menurunkan motivasi aparatur dalam mengerjakan pekerjaannya dan mempengaruhi hasil kerja.

Dalam struktur organisasi secara vertikal di Desa Kebondanas, sikap aparatur merupakan sikap dari bawahan terhadap keputusan-keputusan yang

dilakukan oleh atasan terkait pembangunan yang terjadi di Desa Kebondanas, mulai dari tingkat RT, hingga sampai kepada Kepala Desa. Sementara itu sikap aparatur secara horizontal merupakan sikap sesama aparatur yang mempunyai jabatan yang sama, seperti jabatan Kepala Urusan, sesama RW, RT, dan sesama Kepala Dusun.

Sikap yang di tunjukan oleh bawahan dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Kebondanas, selama ini berjalan lancar-lancar saja tanpa ada aparatur yang bersikap menentang terhadap keputusan-keputusan yang di buat oleh atasan, selama ini aparatur menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu aparatur Kepala Urusan sebagai berikut :

> Selama ini kita bekerja selalu mengikuti perintah saja dari atasan, begitu juga dengan bawahan seperti Kepala Dusun, RW, dan RT, jika ada program pembangunan, tidak pernah ada aparatur yang menentang keputusan atasannya apabila ada, ya mungkin sekedar memberikan masukan saja. (11/07/2015)

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan tersebut, dapat terlihat apabila selama ini sikap aparatur yang menjadi bawahan selalu menghormati segala keputusan atasan, tidak terlihat sikap yang tidak mendukung antara atasan dengan bawahan. Menurut peneliti, hal baik dari sikap yang di tunjukan bawahan kepada atasan dengan cara melaksanakan segala perintah atasan merupakan salah satu motivasi kerja yang baik, dan dapat memperlancar penyampaian tugas-tugas pembangunan yang ada di Desa Kebondanas.

Sikap patuh bawahan terhadap perintah atasan, sikap tersebut masih belum juga bisa dikatakan semuanya baik menurut peneliti, diperlukan juga sedikit sikap

kontra terhadap keputusan atasan, apabila ada keputusan atau kebijakan dari atasan yang kurang baik untuk diterapkan, atau akan merugikan masyarakat, karena dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, musyawarah di junjung tinggi dalam melaksanakan pembangunan, untuk itu perlu juga masukan dari bawahan demi kebaikan pembangunan di Desa Kebondanas.

Selain sikap aparatur yang patuh terhadap perintah atasan, sikap dalam berkomunikasi antara atasan dan bawahan juga harus lancar dan harmonis, ini diperlukan guna meningkatkan motivasi aparatur dalam bekerja melaksanakan pembangunan-pembangunan di Desa Kebondanas. Sikap aparatur yang peneliti amati di dalam kantor Desa Kebondanas cukup baik terhadap para atasan, antara Kepala Desa, Sekertris Desa, dan beberapa Kepala Urusanbahkan mereka sering peneliti lihat mengobrol di dalam kantor desa, meskipun peneliti juga sangat menyayangkan kegiatan tersebut dilakukan pada saat jam kerja berlangsung.

Komunikasi yang cukup baik di dalam kantor akan sangat baik, karena lingkungan dengan komunikasi yang terjalin baik, akan dapat meningkatkan motivasi kerja yang baik pula, berbeda apabila komunikasi di dalam kantor antara aparatur buruk, maka motivasi kerja juga dapat dipengaruhi oleh situasi tersebut menjadi rendah. Sikap antara aparatur Desa Kebondanas di dalam kantor desa menurut peneliti tidak mengalami masalah, dan menjadi hal baik karena sikap aparatur yang mendukung terhadap sesama aparatur lain.

Sikap yang di tunjukan oleh RT dan RW kepada atasan menurut peneliti masih ada RT dan RW yang kurang menunjukan sikap mendukung terhadap Kepala Desa, hal ini peneliti asumsikan dari hasil pengamatan dan komunikasi

kepada beberapa RT dan RW di ke empat dusun, masih ada RT dan RW yang terang-terangan mengaku kurang suka terhadap kepemimpinan Kepala Desa, dan lagi-lagi hal tersebut berhubungan dengan pembangunan di bidang pertanian yang dilakukan oleh Kepala Desa, serta menurut beberapa RT dan RW yang mengeluhkan berkurangnya pendapatan yang di terima RT dan RW karena ada kegiatan-kegiatan yang saat ini tidak diadakan lagi, salah satu contohnya seperti ronda malam.

Ronda malam di Desa Kebondanas biasanya dilakukan oleh para RT dan RW dan terkadang masyarakat juga ikut berpartisipasi, ronda malam ini biasanya di lakukan secara bergiliran setiap harinya. Sebulan sekali biasanya masyarakat di pungut iuran per rumah 10 ribu rupiah, hal ini menurut para RT dan RW sangat berguna bagi mereka karena dapat menambah pemasukan keuangan mereka, akan tetapi menurut mereka Kepala Desa sekarang tidak memperbolehkan lagi.

Selain karena ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan tetapi sekarang tidak dilakukan lagi, RT dan RW juga sangat jarang ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti irigasi, pembangunan jalan, dan acara-acara kegiatan karang taruna. RT dan RW hanya terlihat aktif apabila ada kegiatan posyandu, acara hajatan, dan pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Surat SPPT di Desa Kebondanas biasanya di bagikan oleh Kolektor kepada para RT untuk di bagian kepada masyarakat sekitar dan kemudian melakukan pemungutan pajak sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang di miliki masyarakat.

Sikap yang kurang mendukung ini tidak berani disampaikan RT dan RW secara langsung kepada Kepala Desa, mereka hanya menurut apa yang diperintahkan oleh atasan, tanpa berani memberi masukan, seharusnya menurut peneliti, RT atau RW dapat memberikan masukan terhadap pimpinan jika ada hal-hal baik yang perlu dipertahankan, sikap diam yang dilakukan oleh bawahan, bisa saja diartikan oleh pimpinan bahwa tidak ada masalah, untuk itu diperlukan saling komunikasi antara bawahan dan atasan guna mengetahui masalah-masalah apa saja yang perlu dicarikan solusinya.

Sikap yang di tunjukan oleh bawahan terhadap atasan atau aparatur yang mempunyai jabatan yang sama, menurut peneliti sikap aparatur di dalam kantor sangat baik karena sering terjadi interaksi secara positif yang dilakukan aparatur, hal ini tentu saja dapat meningkatkan motivasi dari aparatur untuk dapat bekerja dengan tenang tanpa ada tekanan dari atasan, akan tetapi hal berbeda justru terjadi terhadap aparatur di luar kantor, sikap RT dan RW yang kurang mendukung terhadap leputusan-keputusan Kepala Desa sangat disayangkan oelh peneliti, karena RT atau RW kurang berani meyampaikan aspirasinya terhadap pimpinan.

Selain itu juga sikap masyarakat terhadap kinerja aparatur sendiri masih belum bisa dikatakan sebagai sikap yang mendukung kepada pemerintahan desa, fakta yang masih terlihat masih sebagian besar masyarakat belum puas akan kinerja aparatur Desa Kebondanas dalam pembangunan infrastruktur selama ini, hal ini tentu didasarkan akibat kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa baik kepada masyarakat-masyarakat Desa Kebondanas mengenai perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sebuah informasi yang menyeluruh agar masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang akan di ambil oleh pemerintah desa dalam membangun desa, akan tetapi informasi tersebut hanya berada di ruang lingkup pemerintahan saja, sehingga masih banyak masyarakat yang merasa kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan seharusnya dapat melibatkan unsur masuarakat di dalamnya masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah Desa Kebondanas.

Peneliti melihat sebenarnya aparatur dan masyarakat bisa saja melakukan kerjasama yang saling menguntungkan andai aparatur mau melalukan transparansi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD melakukan inisiatif berhubungan dengan pemerintah desa dan masyarakat dan saling berkomunikasi serta menyampaikan aspirasi masyarakat, dan masyarakat tidak melakukan aksi karena didasari oleh emosi dan kepentingan dibelakangnya, karena dalam menyampaikan pendapat dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih halus, bukan dengan cara demonstrasi apalagi diskrimininasi kepada kepala desa.

Jika ketiga elemen yang membangun desa tersebut dapat bekerja sesuai kewajibannya, maka peneliti yakin pembangunan di Desa Kebondanas dapat berjalan dengan baik dan cepat serta bergotong royong, sehingga dapat meninbgkatkan efisisensi anggaran, dan efektif dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Perbaikan dalam hubungan masyarakat dan pemerintahan

Desa Kebondanas dapat diwujudkan dengan insiatif dari berbagai pihak untuk belajar dari kesalahan.

4.3.3 Fasilitas Kerja Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Fasilitas dapat juga dikatakan sebagai alat bantu untuk memperingan pekerjaan seseorang dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, fasilitas biasanya berupa benda mati yang mempunyai bentuk dan dapat digunakan berdasarkan kebutuhan orang-orang tersebut, dan fasilitas berbeda-beda bentuknya tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan, namun pada intinya fasilitas merupakan alat pendukung kerja agar lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan dari seseorang.

Fasilitas yang digunakan oleh aparatur dalam bekerja dalam kantor untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan berupa 3 buah komputer, dengan spsesifikasi yang cukup bagus, dengan menggunakan *Central Processing Unit* (CPU) menggunakan *processor dual core* dan menggunakan *Random Access Memory* (*RAM*) sebesar 2 *Giga Byte* (*GB*) dan di tambah monitor *Liquid Crystal Display* (*LCD*) menurut peneliti sudah cukup untuk untuk bisa melaksanakan proses *input* dan *output* data terkait pembangunan, kerja komputer juga bisa digunakan untuk menjalankan 2 program sekaligus atau lebih, jadi untuk *input* dan *output* data tidak akan berjalan dengan lambat.

Keberadaan 3 komputer tersebut kurang dimanfaatkan keberadannnya oleh aparatur, dua komputer berada di dalam ruangan Sekertaris Desa dan ruangan

Kepala Urusan Pembangunan yang satu ruangan dengan Kepala Urusan Pemerintahan, sementara satu komputer lagi tidak dipergunakan lagi karena menurut aparatur, komputer tersebut rusak. Penggunaan dua komputer tersebut kurang dimanfaatkan oleh aparatur, hal ini dapat terlihat dari jumlah perangkat desa yang ada, hanya ada 3 orang yang dapat mengoperasikan komputer, yaitu Sekertaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, dan Kepala Urusan Pemerintahan, sementara perangkat desa yang lainnya dan juga Kepala Desa mengakui bahwa mereka masih belajar menggunakan komputer dan baru bisa sekedar melakukan pengetikan.

Penggunaan komputer yang kurang maksimal tersebut karena satu komputer di ruangan Kepala Urusan Pembangunan digunakan secara bergantian oleh Kepala Urusan yang lain dalam melayani proses administrasi kepada masyarakat, dan jika sedang tidak ada pekerjaan, seperti biasanya aparatur terlihat mengobrol satu sama lain, di dalam ruangan kantor desa. Aparatur juga kurang bisa melakukan perbaikan terhadap komputer-komputer apabila terjadi kerusakan pada *hardware* atau *software*, sehingga perlu teknisi apabila terjadi kerusakan pada komputer.

Kerusakan pada komputer akan dapat mengganggu kinerja aparatur karena banyak data-data yang tersimpan di dalam *drive* komputer desa, seperti yang sering terjadi pada komputer pada umumnya, kejadian kehilangan file dalam *drive* merupakan satu contoh kasus yang dapat menghambat kinerja aparatur desa, sehingga menurut peneliti setiap aparatur berkewajiban untuk mempunyai salinan data pada *drive* yang lain, akan tetapi setelah peneliti tanyakan kepada aparatur,

ternyata aparatur hanya sedikit sekali yang melakukan salinan data-data karena beralasan bahwa komputer desa jarang sekali terjadi kerusakan kehilangan file.

Tidak melakukan *back-up* data, menurut peneliti dapat beresiko apabila komputer terjangkit virus yang dapat menghilangkan data, karena dalam pengunaan komputer, dapat tertular melalui tanpa sepengetahuai pemakai, belum lagi tingkat pengetahuan aparatur terhadap komputer yang masih minim serta kurang mengerti mengenai sistem operasi komputer akan sangat beresiko kehilangan data-data, apalagi kantor Desa Kebondanas masih belum tersedia jaringan internet, dan masih mengandalkan modem yang kecepatannya tergantung pada sinyal operator jaringan.

Masih minimnya jaringan internet tentu akan menghambat kinerja aparatur juga, karena ada beberapa kegiatan seperti aparatur harus berkala melakukan pengolahan data yang diserahkan kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) seperti Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) yang memuat data-data desa yang dicatat melalui komputer dan juga secara manual menggunakan buku berdasarkan data yang diperloleh dari lingkungan Desa Kebondanas.

Fasilitas yang digunakan selain komputer juga dari pra sarana Desa Kebondanas mempunyai gedung kantor desa, yang di bangun pada tahun 2011, pada tahun tersebut pembangunan gedung selesai hanya pada tahap gedung berdiri saja, kondisi gedung temboknya masih bata dan belum dilakukan pengacian, dan belum memakai keramik pada lantainya, dan di renovasi pada tahun 2012 dinding kantor mulai dilakukan pengacian dan pengecetan genteng dan tembok, dan tahun

2013 gedung tersebut di renovasi kembali dengan dilakukan pengecetan ulang, perbaikan toilet umum, dan memasang keramik pada lantainya.

Desa Kebondanas juga mempunyai satu gedung lagi yaitu gedung Dharma Wanita, biasanya gedung tersebut digunakan untuk tempat melaksanakan musyawarah, acara kegiatan ibu-ibu PKK, dan kegiatan seni, akan tetapi sekarang gedung tersebut telah beralih fungsi menjadi Kantor Kecamatan Pusakajaya yang sejak tahun 2010 menempati Gedung Dharma Wanita.

Gambar 4.8
Gedung Kantor Desa Kebondanas dan Gedung Kantor Kecamatan Pusakajaya



(Sumber : Kantor Desa Kebondanas Tahun 2015)

Gambar di atas dapat di lihat merupakan gedung kantor Desa kebondanas dan kantor Kecamatan Pusakajaya, Kantor Desa Kebondanas adalah gedung yang berwarna hijau, sedangkan untuk kantor Kecamatan merupakan gedung yang berwarna *orange*, yang dulunya merupakan sebagai gedung tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan desa dan kegiatan di masyarakat, serta sebagai balai musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Kantor Kecamatan yang berada disebelah timur kantor Desa Kebondanas, yang merupakan gedung milik Desa Kebondanas, di sebelah timurnya lagi merupakan lahan parkir yang menjadi sengketa antara masyarakat dan pemerintah desa, terkait jual beli lahar parkir tersebut yang rencananya nanti akan di bangun kantor Kecamatan Pusakajaya disamping gedung musyawarah desa yang sekarang untuk sementara ditempati menjadi kantor Kecamatan Pusakajaya.

Fasilitas yang dipunyai oleh Desa Kebondanas dalam melaksanakan pembangunan di luar kantor kebanyakan fasilitas tersebut merupakan fasilitas pertanian, seperti traktor, dan mesin diesel penyedot air. Jumlah traktor yang dimiliki oleh Desa Kebondanas berjumlah dua Traktor, sedangkan mesin penyedot air mempunyai 3 alat, keberadaan alat pertanian tersebut saat ini di pegang oleh Kelompok Tani Desa Kebondanas yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai organisasi mitra pemerintah Desa Kebondanas.

Akan tetapi sayangnya fasilitas pertanian tersebut penggunannya bukan untuk melayani para petani Desa Kebondanas, seharunya alat-alat pertanian tersebut dapat digunakan oleh para petani di Desa Kebondanas secara gratis, dan masyarakat hanya perlu membayar ongkos untuk membeli solar saja, seperti yang diungkapkan oleh aparatur sebagai berikut : “ Fasilitas desa buat petani ada mesin penyedot air 3 yang dapat digunakan oleh petani secara gratis dan petani hanya perlu membeli solarnya saja, dan juga traktor yang dapat digunakan oleh para petani.” (11/072015)

Pernyataan aparatur di atas yang mengatakan bahwa alat-alat tersebut dapat digunakan dengan gratis ternyata pada kenyataannya berbanding terbalik di

lapangan, alat-alat tersebut sangat jarang digunakan oleh para petani Desa Kebondanas, petani di empat dusun yang sudah peneliti tanyai, ternyata menghasilkan jawaban yang sama, yaitu penggunaan alat tersebut tidak digunakan secara gratis, ternyata sama saja di pungut biaya, bahkan menurut para petani, keberadaan alat-alat tersebut menjadi ladang bisnis oleh Kelompok Tani dengan disewakan ke desa-desa lain.

Peneliti juga mencoba mengetahui kebenaran tersebut, peneliti datang ke tempat bendahara kelompok tani (9/7), yang mengatakan bahwa traktor-traktor tersebut sedang dalam perbaikan di bengkel traktor Djadja Teknik, di Desa Sukra Kabupaten Indramayu, akan tetapi setelah penelitidatang di bengkel traktor Djadja Teknik, dan peneliti tanyai kepada pemilik bengkel tersebut, ternyata traktor milik Desa Kebondanas ternyata tidak ada, sementara itu peneliti mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat yang bekerja mengemudikan traktor kelompok tani, bahwa salah satu traktor sedang di pakai di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap keberadaan traktor tersebut, ternyata memang kepemilikan fasilitas dari Desa Kebondanas menjadi alat bisnis untuk meraup keuntungan, bukan untuk membantu masyarakat membangun pertanian dan perekonomian masyarakat, akibatnya masyarakat Desa Kebondanas lebih suka menyewa traktor orang lain daripada memakai milik desa. Mesin penyedot air juga jarang sekali dipergunakan oleh masyarakat Desa Kebondanas untuk keperluan pertanian, dan pemakaiannya tidak gratis seperti yang di bilang oleh aparatur, pemakaian fasilitas pertanian tersebut lebih banyak digunakan oleh

anggota kelompok tani tersebut dan dikomersilkan dengan menjual layanan ke petani-petani di desa lain.

Keberadaan fasilitas pertanian ini juga sebenarnya diketahui oleh aparatur dan hal tersebut juga diakui oleh Kepala Desa, bahwa Kepala Desa sering mendengar alat-alat tersebut digunakan untuk menghasilkan uang dan di monopoli oleh Kelompok Tani seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

> "Kelompok Tani itu orang-orangnya susah, mereka itu tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah desa kalau datang bantuan, kalau pengajuan saja mereka ribut, tapi kalau bantuan datang tidak pernah desa di kasih tahu, mereka menggunakan bantuan-bantuan dari pemerintah hanya untuk kepentingan mereka dan untuk menghasilkan uang. Dari informasi yang saya dengar dari Kelompok Tani di desa lain, mereka mengatakan bulan kemarin ada bantuan berupa pupuk, tapi mereka bilang tidak ada, pihak UPTD Pertanian juga sudah saya tanyain, ternyata mereka juga bilang tidak ada, padahal desa lain dapat, ini sudah pasti ada permainan di belakang".(31/7/2015)

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa di atas, dapat tergambar bagaimana persoalan di sektor pertanian yang ada di Desa Kebondanas, pihak Kelompok Tani kurang terbuka terkait bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, karena jika bantuan pertanian datang, pihak UPTD tidak pernah menyerahkan kepada desa, akan tetapi langsung kepada Kelompok Tani, karena itu pihak desa jarang sekali tahu datangnya bantuan-bantuan, bahkan Kepala Desa juga meragukan traktor yang dipunyai desa masih utuh berjumlah dua.

Hasil penelitian mengenai fasilitas yang dipunyai oleh Desa Kebondanas tersebut, peneliti menganggap bahwa fasilitas kerja yang dimiliki Desa Kabondanas di dalam kantor desa sudah cukup baik dengan keberadaan 3 komputer, akan tetapi memang penggunaan aparatur terhadap komputer tersebut masih kurang maksimal, sementara itu fasilitas pertanian yang dimiliki oleh Desa

Kebondanas justru di salahgunakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra desa, dan aparatur juga tidak bisa apa-apamengambil tindakan, menurut peneliti kondisi seperti ini perlu diperbaiki guna meningkatkan pembangunan petani Desa Kebondanas yang lebih baik.

4.3.4 Hubungan Kerja Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Hubungan kerja dapat diartikan sebagai hubungan antara pekerja dalam suatu organisasi dengan pekerja lainnya, hubungan tersebut dapat diartikan sebagai komunikasi antar pekerja, dalam mencapai suatu tujuan dalam berorganisasi, hubungan kerja yang baik akan dapat mempengaruhi tingkat motivasi seseorang, hubungan yang baik akan dapat menciptakan hasil kerja yang baik pula bagi suatu organisasi tersebut, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, hubungan kerja antara pekerja buruk, akan menghasilkan motivasi kerja yang buruk pula, dan akan berakibat pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Kebondanas, dalam kegiatan sehari-harinya hubungan aparatur Desa Kebondanas terlihat kondusif, jarang sekali terlihat aparatur berselisih paham dengan aparatur lainnya, bahkan hubungan pemerintah desa dengan BPD juga terlihat akur, dan jarang terjadi masalah, aparatur di dalam kantor menurut peneliti dapat dikatakan mempunyai pemahaman yang sama dalam bekerja.

Aparatur sering terlihat akrab pada jam kerja berlangsung, hal ini dapat di lihat dari kegiatan yang dilakukan oleh aparatur jika pekerjaan sedanng tidak

banyak, aparatur sering terlihat mengobrol dalam ruangan kantor, menggambarkan bagaimana kondisi kerja antar aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya di dalam kantor yang terlihat akrab satu sama lain, akan tetapi ada hal yang masih perlu diperbaiki juga terkait hubungan kerja antar aparatur tersebut, aparatur harus lebih baik menjaga citra kepada masyarakat, karena masih menjadi kebiasaaan aparatur yang sedang tidak banyak pekerjaan melakukan aktivitas merokok dalam ruangan kantor yang menurut peneliti akan mengganggu pernapasan dari aparatur itu sendiri baik perokok maupun bukan, juga dengan masyarakat yang ada di dalam kantor.

Hubungan kerja aparatur dengan beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Kebondanas juga dapat dikatakan baik, hubungan kerja antar aparatur dengan beberapa anggota BPD juga sering terlihat akur di kantor desa, dan terkadang di lingkungan, dan jika ada program-program pembangunan di Desa Kebondanas, mereka sering melakukan musyawarah bersama antara aparatur dengan BPD. Selain dengan BPD.

Hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD yang terjalin baik, akan tetapi hubungan pemerintah desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Kelompok Tani terjalin cukup buruk, karena kurang terbukannya Kelompok Tani dalam menerima bantuan, oleh karena itu pihak pemerintah desa tidak tahu apa-apa jika ada bantuan datang, seperti yang terbaru pada bulan juni, desa-desa lain berdasarkan informasi Kepala Desa dan aparatur telah menerima bantuan pupuk, akan tetapi pihak UPTD Pertanian dan Kelompok Tani Desa Kebondanas mengatakan tidak pernah menerima bantuan, hal ini terjadi bukan saat ini saja

melainkan tahun-tahun belakangan juga sering hubungan pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa terjalin kurang baik.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Kebondanas sebenarnya dapat dilakukan dengan baik karena hubungan antara aparatur yang baik, akan tetapi sejak awal terpilihnya Kepala Desa dalam Pilkadesa Desa Kebondanas hingga saat ini, banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap aparatur Desa Kebondanas dalam melaksanakan pembangunan, hubungan aparatur dengan masyarakat menjadi buruk, hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya aksi demo yang dilakukan masyakat baik itu terkait pembangunan di sektor pertanian, jalan, atau juga mengenai penjualan aset desa yang tidak diketahui masyarakat.

Hubungan yang buruk dengan masyarakat akan sangat tidak baik bagi kelancaran pembangunan infrastruktur di Desa Kebondanas, hal ini dapat di lihat dari susahnya membangun budaya gotong royong masyarakat untuk membantu pemerintahan, pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, sangat jarang melibatkan masyarakat dalam bergotong royong melaksanakan pembangunan, seringkali pembangunan yang dilakukan desa dalam membangun beberapa infrastruktur yang menggunakan anggaran desa dilakukan dengan membayar pekerja dengan sistem borongan, yang sudah tentu menurut peneliti akan sangat boros, jika dapat memanfaatkan sikap gotong royong antar masyarakat akan lebih baik karena pembangunan juga untuk kepentingan masyarakat, hanya karena kurangnya aparatur berkomunikasi dengan masyarakat dan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat seolah menciptakan sikap yang tidak percaya kepada pemerintahan Desa Kebondanas saat ini.

Peneliti menganggap mengenai hubungan kerja aparatur Desa Kebondanas seharusnya dapat berjalan baik mengingat hubungan antara aparatur dengan BPD tidak mempunyai masalah, hubungan kerja antara aparatur dengan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa hendaknya dapat diperbaiki oleh aparatur dengan berbagai cara melalui komunikasi yang intensif dan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kebondanas, maka peneliti yakin permasalahan-permasalah dalam pembangunan di Desa Kebondanas akan dapat terselesaikan secara perlahan.

4.3.5 Kebijakan Pimpinan Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Kebijakan menjadi suatu pedoman dan dasar dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan pimpinan dapat juga diartikan sebagai aturan yang di buat oleh pemimpin untuk mengatur jalannya suatu organisasi menurut kehedak dirinya atau kepentingan organisasi yang dipimpinnya, kebijakan pimpinan mempunyai kewajiban untuk dipatuhi oleh setiap anggota dalam organisasi tersebut, kebijakan pimpinan yang tidak merugikan bawahan, atau orang lain, tentu akan sangat mempengaruhi tingkat motivasi kerja bawahannya, kebijakan yang menguntungkan akan membuat pekerja menjadi lebih bersemangat dalam melakukan pekerjanannya, akan tetapi apabila kebijakan tersebut merugikan bawahan, tentu motivasi kerja bawahan menjadi menurun dan akan sangat mempengaruhi kualitas kerjanya.

Kepala Desa Sebagai seseorang yang mempunyai kewenangan untuk mengatur segala hal mengenai penyelenggaraan pembangunan di Desa Kebondanas yang di pilih oleh masyarakat desa untuk mengatur jalannya roda pemerintahan yang mementingkan kebutuhan masyarakat. Dalam memimpin masyarakat Desa Kebondanas, Kepala Desa mempunyai hak untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam melakasanakan pemerintahan di Desa Kebondanas, kabijakan tersebut dapat berupa aturan mengenai tata cara melaksanakan pekerjaan bagi bawahannya, atau juga kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD.

Sejak terpilih menjadi Kepala Desa hingga saat ini Kepala Desa sedikit banyaknya telah mengubah kebijakan dari Kepala Desa sebelumnya yang di anggap perlu di perbaiki, kebijakan kepada aparatur Desa Kebondanas dalam bekerja di dalam kantor yang dulunya aparatur bekerja menggunakan baju bebas, saat ini aturan dalam berpakaian di buah bagi aparatur untuk memakai baju Linmas, kemeja atau batik, dan pakaian olahraga di hari jumat, hal ini menurut Kepala Desa aparatur agar terlihat lebih rapi dan formal dalam bekerja, hingga tidak menimbulkan kesan apa adanya, aturan tersebut merupakan aturan yang tidak tertulis yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada bawahannya melalui instruksi.

Aparatur Desa Kebondanas juga semuanya setuju mengenai aturan dalam berpakaian tersebut, akan tetapi sampai sejauh ini peraturan tersebut mulai mengendur karena sekarang banyak aparatur yang memakai pakaian kaos pada

hari senin-kamis yang berdasarkan kebijakan Kepala Desa menyuruh mereka memakai baju Linmas dan Kemeja.

Kebijakan Kepala Desa kepada bawahannya juga saat ini mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui SPPT kepada masyarakat yang sebelumnya para RT yang mendapatkan tugas tersebut atas persetujuan kolektor, saat ini tidak diperkenankan lagi membagikan SPPT kepada warga. Kepala Desa juga membuat kebijakan untuk tidak lagi mengadakan Siskamling yang dulunya biasa dilakukan oleh para RT di tiap dusun, Siskamling tersebut dilakukan oleh RT dan RW setiap malam dengan cara bergantian dan terkadang di bantu oleh masyarakat, dari hasil Siskamling setiap malam tersebut, para RT meminta iuran sebesar 10 ribu rupiah per satu rumah setiap bulan, Kepala Desa tidak lagi memperbolehkan RT untuk melakukan Siskamling dengan alasan kasihan kepada para RT dan RW karena akan mengganggu pekerjaan pada siang hari.

Peneliti menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang selama ini di buat oleh Kepala Desa masih ada beberapa kebijakan yang seharusnya di rubah, akan tetapi perlu di perbaiki lagi, seperti contohnya adalah kebijakan pelarangan Siskamling, padahal menurut penelti Siskamling itu sangat bagus bagi ketentraman lingkungan, dimana sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, pemerintah desa wajib memberikan rasa aman kepada warganya. Program Siskamling tersebut akan sangat bagus bagi lingkungan karena akan dapat mengurangi resiko kejahatan pada malam hari, karena linguknga desa yang sepi,

dengan adanya Siskamling setidaknya akan ada yang menjaga ketentraman di lingkungan.

Kegiatan Siskamling tersebut menurut peneliti sebaiknya ditingkatkan misalnya sepeti juga dengan meminta bantuan masyarakat yang secara sukarela untuk ikut kegiatan Siskamling, masyarakat yang saat ini ikut secara sukarela dalam kegiatan Siskamling biasanya orang-orang yang tinggal di sekitar Kantor Desa Kebondanas yang sulit tidur atau biasa begadang, jika saja aparatur mampu menggerakan masyarakat untuk ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, tentu akan sangat baik bagi Desa Kebondanas.

Kebijakan yang di buat oleh Kepala Desa juga sebenarnya banyak kebijakan yang baik seperti kebijakan untuk berpakaian rapi kepada aparatur, peneliti menganggap akan sangat enak di lihat apabila aparatur bekerja dengan menggunakan kemeja atau batik, karena peneliti dulunya sering melihat aparatur bekerja memakai kaos seperti orang yang ingin pergi berolahraga, akan tetapi tetap saja meskipun kebijakan tersebut pada awal pemerintahan Kepala Desa ditetapkan, saat ini kebijakan tersebut mulai longgar dan masih ada aparatur yang bekerja dengan memakai kaos.Kebijakan-kebijakan yang telah di buat oleh Kepala Desa menurut peneliti masih ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan agar dapa memberikan motivasi bagi bawahan untuk dapat bekerja leboih giat lagi, sebagai atasan, Kepala Desa perlu mendengar masukan dari bawahan agar dapat membuat kebijakan-kebijakan secara tepat.

4.3.6 Kondisi Kerja Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Kondisi kerja dapat juga diartikan sebagai situasi kerja yang terjadi baik itu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok organisasi, kondisi kerja di alami oleh seseorang atau kelompok pada saat ini, kondisi kerja bisa saja dihadapkan pada situasi yang lancar, bisa juga kondisi kerja tersebut sedang tidak lancar, atau mengalami berbagai gangguan kerja di lapangan, kondisi kerja dapat mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja yang dimilikinya, karena itu, kondisi kerja yang kondusif akan sangat berpengaruh terhadap hasil kerja yang dibuatnya.

Kondisi kerja yang saat ini terjadi dalam pembangunan Desa Kebondanas dapat digambarkan dengan oleh peneliti melalui peneltian ini, kondisi kerja di dalam kantor Desa Kebondanas, suasana yang di bangun oleh aparatur cukup kondusif, akan tetapi terkadang aparatur juga mendapatkan tekanan dalam bekerja karena di kantor desa sering sekali dijadikan sebagai objek demo oleh masyarakat Desa Kebondanas, berbagai tuntutan atas kekecewaan pemerintahan saat ini marak dilakukan, mulai dari masalah pertanian, masalah ijazah palsu yang dialamatkan kepada Kepala Desa, masalah jalan, dan juga masalah penjualan aset desa yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Seringnya demo yang dilakukan oleh masyarakat juga dikatakan oleh bebrapa aparatur bahwa kejadian tersebut sangat mengganggu pekerjaan, jumlah pendemo yang banyak membuat suasana kantor desa menjadi tidak kondusif, tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap motivasi aparatur dalam

menjalankan pekerjaannya yang akan dapat berakibat terciptanya hasil kerja yang kurang maksimal.

Kondisi pembangunan sektor pertanian saat ini selalu mengalami masalah apabila musim tanam pasca musim penghujan tiba, masalah air menjadi faktor utama, karena petani sangat bergantung pada kondisi air yang ada, air yang mengaliri sungai di Desa Kebondanas saat ini sedang surut karena air sungai sedang di gilir, saat ini peneliti melihat air di bendung di beberapa pintu air di Kecamatan Compreng yang saat ini sedang musim tanam padi.

Masyarakat di Kecamatan Pusakajaya khusunya di Desa Kebondanas sudah sangat mengharapkan datangnya air guna mengairi sawah-sawah mereka karena sudah 3 bulan lebih mereka tidak melakukan menanam padi, padahal biasanya paling lama tanam padi dari panen sebelumnya hanya sekitar 1,5 sampai dua bulan saja waktu tunggu air bagi petani, jelas ini akan menghambat perkonomian masyarakat di Kecamatan Pusakajaya.

Lambatnya pasokan air yang datang ke Kecamatan Pusakajaya dapat disebabkan oleh kurang baiknya manajemen pembagian air yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang, serta kurang sigapnya aparatur melaporkan atau mendiskusikan masalah air tersebut kepada pihak kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang.

Berdasarkan informasi yang penelti terima, sebenarnya giliran air dapat di rundingkan melaui kesepakatan-kesepakatan dengan UPTD Dinas Bina Marga dan Pengairan serta pihak desa dan kecamatan, bahkan menurut informasi dari

aparatur dan masyarakat sebenarnya air itu dapat di beli apabila kondisi pertanian sedang menghawatirkan, tentu saja dengan kesepakatan dengan pihak-pihak lain.

Air merupakan faktor yang sangat penting guna menunjang pertanian, akan tetapi selain air, irigasi juga sangat penting karena akan dapat membantu petani mendapatkan air, meskipun jarak antara sawah dengan sungai jauh, untuk itu keberadaan irigasi akan sangat dibutuhkan guna mengalirkan air ke sawah-sawah petani. Kondisi irigasi yang ada saat ini menurut peneliti sangat menghawatirkan mengingat kondisinya yang dipenuhi oleh rumput, sampah, dan pendangkalan, serta pembangunan bangunan yang menutupi irigasi, seperti gambar di bawah ini :

Gambar 4.9
Kondisi Irigasi Yang di Penuhi Rumput



Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Gambar di atas menjelaskan bagaimana kondisi sebagian besar irigasi di Desa Kebondanas, hal ini yang salah satu penyebab yang memicu demo yang dilakukan oleh masyarakat kepada aparatur, kondisi irigasi yang kurang terurus membuat masyarakat meminta kepada aparatur desa untuk melakukan upaya

membenahi irigasi, dan aparatur juga menyatakan bahwa nantinya akan ada program untuk *cleaning water*, atau pembersihan air di irigasi tetapi waktunya masih belum ditentukan dan masih sebatas rencana.

Kondisi kerja dalam pembangunan jalan juga masih belum memberikan kepuasan kepada masyarakat Desa Kebondanas, masyarakat mengharapkan pembangunan jalan dapat dilakukan dengan cara di aspal, apalagi saat ini masih di Desa Kebondanas sedang ada pengeboran minyak di areal persawahan di Dusun Kebondanas Kidul. Saat di izinkannya pengeboran tersebut pemerintah desa menjanjikan bawha jalan-jalan di Dusun Kebondanas Kidul dan Dusun Karanganyar akan di aspal, sarana olahraga juga akan diperbaiki dan diberikan bantuan keuangan untuk membangun tim sepak bola.

Janji tersebut kini belum sepenuhnya di tepati, karena perbaikan jalan yang dijanjikan akan di aspal, tetapi bantuan yang datang dari pihak pertamina hanya berupa batu yang dibagikan kepada setiap jalan dan gang di Dusun Kebondanas Kidul dan Dusun Karanganyar, sedangkan Dusun Kebondanas Lor dan Dusun Sumursari tidak kebagian, bantuan Pertamina berupa batu tersebut dapat di lihat dari gambar berikut :

Gambar 4.10
Batu Bantuan Pertamina di Dusun Kebondanas Kidul



Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Pemerintah Desa mengatakan bahwa pembagian batu tersebut hanya diberikan kepada warga yang berada di Dusun Kebondanas Kidul dan Dusun Karanganyar, sedangkan Dusun Kebondanas lor dan Dusun Sumursari tidak kebagian,dikarenakan pembangunan Pertamina yang berada di Dusun Kebondanas Kidul dan juga berdekatan dengan masyarakat di Dusun karanganyar, alasan tersebut sempat membuat masyarakat Dusun Sumursari dan Kebodnanas Lor sempat melakukan protes karena merasa tidak adilnya pembagian bantuan.

Sedangkan bantuan untuk memperbaiki sarana olahraga yang dijanjikan dapat di tepati oleh Pemerintah Desa dan Pertamina, bantuan tersebut berupa pencukuran lapangan bola, pemberian bola dan sepatu bola kepada pemain bola, serta pemberian seragam bola yang dapat di lihat sebagai berikut :

Gambar 4.11
Seragam Sepak Bola Bantuan Dari Pertamina



Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Gambar di atas merupakan salah satu bantuan dari pihak Pertamina yang melakukan pengeboran di Dusun Kebondanas Kidul selain bantuan berupa batu untuk jalan. Bantuan sarana olahraga tersebut sangat membantu bagi generasi muda yang mencintai olahraga khususnya sepakbola, karena selama ini tim sepakbola yang ada di Desa Kebondanas tercatat sering berprestasi baik itu di turnamen antar kecamatan atau antar kabupaten. Bantuan untuk perbaikan sarana olahraga ini juga berkat kekompakan pemuda-pemuda di Desa Kebondanas dan di bantu oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa sehingga menghasilkan bantuan sarana olahraga seperti seragam bola, sepatu bola, bola, dan uang tunai untuk biaya pemotongan rumput, pembenahan irigasi pinggir lapangan yang tertutup rumput, dan juga pembiayaan mengikuti turnamen di Kabupaten Indramayu nulan september tahun 2015.

Kondisi kerja dalam kesehatan masyarakat di sini peneliti melihat usaha pembangunan kesehatan bagi masyarakat Desa Kebondanas terbilang cukup baik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak, karena pelayanan

Posyandu dilakukan setiap sebulan sekalidan tiap dusun sudah mempunyai gedung pelayanan sendiri-sendiri, dan di Desa Kebondanas terdapat 4 bidan yang satunya bahkan sudah mempunyai satu klinik bersalin yang besar di Dusun Karanganyar, yang untuk kesehatan masyarakat, Desa Kebondanas juga disediakan fasilitas Puskesmas di Kecamatan Pusakajaya yang terletak di perbatasan Desa Kebondanas dan Desa Karanganyar.

Menrurut peneliti, kondisi kerja yang ada di Desa Kebondanas jika di lihat dari sektor pertanian, kondisi kerja masih memerlukan perbaikan-perbaikan terutama permasalahan air dan irigasi, karena masyarakat saat ini masih kesulitan mendapatkan air untuk mengaliri sawah mereka karena faktor pembagian air yang tidak sesuai jadwal, dan juga kondisi irigasi yang sering di penuhi rumput dan sampah yang dapat mengganggu aliran air ke sawah-sawah petani, masyarakat mengharapkan agar pemerintah desa bersama masyarakat dapat turun tangan membenahi irigasi, akan tetapi pemerintah desa kurang menanggapi secara serius dan kurang memberikan respon yang cepat dari aspirasi masyarakat.

Kondisi jalan juga menurut peneliti harus dilakukan perencanaan dengan mempertimbangkan anggaran yang ada guna merealisasikan pengasapalan jalan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, untuk itu peneliti melihat masih banyak infrastruktur yang perlu di benahi di Desa Kebondanas agar dapat menciptakan Desa Kebondanas yang makmur, mandiri dan sejahtera.

4.3.7 Pola Kepemimpinan Aparatur Desa Kebondanas Dalam Pembangunan Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang

Pola kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi atau kelompok, dengan gayanya tersebut dia lalu memberikan arahan kepada bawahannya dalam bekerja dalam mencapai tujuan, tiap-tiap pemimpin mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam memipin suatu organisasi dan hal tersebut dapat terlihat dari perlakuan pemimpin kepada bawahannya.

Karakteristik kepemimpinan aparatur Desa Kebondanas dalam bekerja membangun desa dapat di lihat dari kepemimpinan pemimpin aparatur desa yaitu Kepala Desa dalam menyelenggrakan urusan pembangunan di Desa Kebondanas. Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, memimpin bawahannya dilakukan dengan cara kepemimpinan yang berbeda, pada awal kepemimpinannya, Kepala Desa jika akan mengambil suatu keputusan jarang sekali melibatkan bawahannya untuk sekedar memberikan saran bagi program-program pembangunan di Desa Kebondanas, salah satunya dengan penjualan aset desa yaitu tanah, yang di jual untuk dijadikan kantor Kecamatan Pusakajaya, peneliti kemudian mencari informasi, ternyata aparatur desa sendiri dan masyarakat masih banyak yang tidak tahu dan sampai saat ini permasalahan tersebut masih dipertanyakan oleh masyarakat melalui cara-cara demo yang mempertanyakan penjualan tanah tersebut yang uangnya tidak jelas mengalir kemana.

Sikap Kepala Desa pada awal menjabat sangat berbeda dengan sekarang, pada awal menjabat, beberapa aparatur mengatakan bahwa suasana kantor desa kurang kondusif karena banyak aturan yang diterapkan oleh Kepala Desa seperti aturan berpakaian, atau jika pekerjaan yang di suruh oleh Kepala Desa terlambat sedikit, Kepala Desa sering marah, akan tetapi sikap tersebut perlahan menghilang dan Kepala Desa lebih bersikap ramah kepada bawahan dan jika ada pelanggaran prosedur dalam bekerja juga tidak pernah ditegur lagi.

Cara memimpin Kepala Desa pada awal kepemimpinan dengan saat ini yang cenderung berubah berdasarkan pengamatan peneliti selama ini lebih disebabkan karena kurang kenalnya Kepala Desa dengan bawahan, juga seiring berjalannya waktu, komunikasi antara Kepala Desa dengan bawahan berjalan dengan harmonis, meskipun komunikasi dengan aparatur tingkat RT dan RW masih berjalan kurang harmonis.

Pola kepemimpinan Kepala Desa yang berubah seiring berjalannya waktu tersebut, tentu dapat mempengaruhi motivasi aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya dalam membangun Desa Kebondanas, cara pemimpin Kepala Desa dalam memimpin organsiasi pemerintahan desa yang selalu melibatkan aparatur dalam pengambilan keputusan akan membuat aparatur manjadi semakin memiliki motivasi untuk bekerja.

Sikap Kepala Desa yang sekarang sudah lebih aktif dalam berkomunikasi dengan bawahannya juga akan dapat meningkatkan motivasi kerja aparatur desa, karena lingkungan organisasi yang kondusif dengan di dukung oleh sikap pemimpin yang ramah terhadap bawahannya akan mampu meningkatkan motivasi

aparatur dalam bekerja dan mungkin akan berpengaruh juga terhadap hasil kerja yang akan dicapai.

Komunikasi yang lebih lancar tentunya akan sangat membantu untuk menggerakan pemerintahan dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Kebondanas, dengan adanya sikap dari pemimpin yang lebih komunkiatif terhadap bawahannya, tentu akan membuat bawahan menjadi lebih tahu tentang perencanaan pembangunan, meski menurut peneliti sikap komunikatif juga sangat diperlukan antara pemerintah Desa Kebondanas kepada masyarakat, agar masyarakat merasa lebih dilibatkan dengan mengedepankan transparasi dalam melaksanakan pembangunan di Desa kebondanas.

Berjalan baik atau tidaknya suatu pemerintahan, tentu didalamnya proses komuikasi sangat mempengaruhi antara pemerintahan dan masyarakatnya, karena didalamnya melibatkan banyak individu dalam wilayah yang cukup luas, sehingga diperlukan komunikasi sebagai wujud dari pemberian informasi, karena tidak adanya informasi yang diketahui masyarakat, dan pemerintah desa mengambil keputusan sepihak, tentu aksi menentang pemerintahan desa akan dilakukan oleh masyarakat, meski menurut peneliti hal tersebut juga tidak dibenarkan.

Sikap komunikasi antara pemerintah Desa Kebondanas dan juga masyarakat masih sangat kurang, sehingga terkadang masyarakat meminta penjelasan melalui demo-demo yang menghasilkan musyawarah secara paksa, setiap masyarakat yang melakukan demo, biasanya selalu menghasilkan musyawarah secara mendadak terkait tuntutan dari masyarakat itu sendiri ketika melakukan demo, seperti dokumentasi di bawah ini :

Gambar 4.12
Musyawarah Mendadak Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat



Sumber : Dokumentasi 2015

Gambar di atas merupakan kondisi yang terjadi setelah demo yang dilakukan masyarakat berlangsung kemudian pihak-pihak terkait secara sepakat melakukan musyawarah guna mendengarkan tuntutan dari masyarakat yang berlangsung di kantor Kecamatan Pusakajaya. Masyarakat hanya dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah Desa kebondanas dengan cara demikian, karena tidak adanya transparansi dalam perencanaan pembangunan di Desa Kebondanas oleh pemerintahan Desa Kebondanas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat, di tambah lagi masih belum lancarnya pembangunan di Desa Kebondanas dan juga berbagai hambatan lainnya yang belum terpecahkan membuat masyarakat tidak mempunyai piliahan lain selain melaukan aksi demo yang tentu saja menurut peneliti akan mengganggu kegiatan di Kantor Desa Kebondanas dan juga kantor Kecamatan Pusakajaya.

Pemerintah Desa Kebondanas untuk itu diperlukan perubahan dalam pola kepemimpinan antara aparatur kepada masyarakat, aparatur harus bisa melakukan transparansi dan koordinasi kepada masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan proses pembangunan, sehingga nantinya pemerintah desa akan mendapatkan kembali rasa kepercayaan dari masyarakat Desa Kebondanas, sehingga sifat

gotong royong masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan menghasilkan pembangunan Desa Kebondanas yang berlandaskan kepada musyawarah dan gotong royong.

Budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa indonesia perlu di dukung dan dikembangkan oleh pemerintah agar dapat menjadi kekuatan dalam membangun negeri dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan membangun sikap gotong royong yang di mulai dari masyarakat desa, karena desa merupakan pondasi yang jumlahnya sangat banyak yang dapat menopang Indonesia dalam pembangunan secara keseluruhan, untuk itu Desa Kebondanas harus mampu menjadi desa yang bergotong royong dalam pembangunan, dan disertai oleh kinerja yang baik dari aparatur Desa Kebondanas dalam pembangunan.